**PRESS RELEASE**

**Pernyataan Sikap: Kebijakan Libur Dua Pekan dan Pengurangan Moda Transportasi**

Aturan kebijakan *lockdown*, seperti dengan cara memindahkan kegiatan yang tadinya di luar rumah menjadi di rumah untuk tujuan memerangi dan membatasi penyebaran virus corona (covid-19), memang positif. Tetapi sayangnya, beberapa poin kebijakannya dibuat tanpa kajian yang mendasar.

Pemerintah DKI Jakarta memang melakukan respons untuk menanggulangi penyebaran virus corona, dengan cara memilih meliburkan semua kegiatan menjadi di rumah. Tetapi sayangnya kebijakan itu tidak dibuat dengan tegas, layaknya hanya anjuran, seperti beberapa kampus dan perusahaan tidak diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan itu.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan itu diserahkan kepada masing-masing pengambil kebijakan dari kampus dan perusahaannya masing-masing. Menjadi persoalan adalah ketika kebijakan itu diikuti pula dengan beberapa kebijakan terkait moda transportasi. Di satu sisi, Pemerintah DKI Jakarta seperti berpihak kepada para pengusaha, seperti diberhentikannya sementara kebijakan ganjil-genap, dengan argumentasi bahwa kerumunan, massa dalam moda transportasi, malah menyebabkan mudahnya penyebaran virus corona. Tetapi di sisi lain, ini yang tak habis pikir, layaknya hukum alam bahwa para pengusaha jumlahnya lebih kecil dari pekerja. *Kok* malah bisa-bisanya, terkait moda transportasi untuk para pekerja malah dibatasi, bahkan jam operasionalnya pun dipersingkat.

Akhirnya, kebijakan ini menunjukkan dibuat dengan hanya melakukan respons semata, tanpa disertai kecermatan dalam penelitian atas pilihan kebijakan, seperti hari ini kita saksikan bahwa menumpuknya para penumpang trans jakarta yang diakibatkan oleh pengurangan jumlah moda transportasi dan dibatasinya waktu jam operasional. Oleh karena itu, kami dari Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) berdasarkan diskusi yang mendalam di internal kami perlu menyoroti permasalahan ini dan memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah DKI Jakarta perlu membatalkan keputusan dari kebijakan mengenai moda transportasi secepatnya agar penumpukan tidak terjadi pada saat pulang kerja maupun beberapa hari ke depan. Ini juga menunjukkkan bahwa kebijakan terkait pengurangan jumlah moda transportasi massa tidak terjadi pengurangan dan jam operasionalnya berjalan seperti biasa.
2. Jika kebijakan ini ingin tetap diterapkan maka pemerintah DKI perlu merembukkan kembali dengan para pengusaha bahwa memang kebijakan ini akan seluruhnya ditaati tanpa tebang pilih.
3. Andai kebijakan ini akan diambil win-win solution, maka kebijakan ini diperingkas masa berlakunya, seperti, dari 2 minggu menjadi 1 pekan saja.

Yang menyatakan Respons dan Sikap,

Depok, Senin 16 Maret 2020,

**Efriza, S.IP, M.Si**

(Direktur Eksekutif PSKP)